

إحياء العربية

المجلة التربوية و تدريس اللغة العربية

النظرية التحليلية في معنى الكلمة

SEMANTIC PERSPECTIVE OF ENGLISH
DEONTIC MODALITY

STRATEGI *GENIUS LEARNING* DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA

POTRET PENDIDIKAN NILAI

HADIS-HADIS TENTANG PENDIDIKAN TAUHID

PERANAN H.ABDULLAH AHMAD DALAM
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM
(Telaah Retrospektif Dan Prospektif)

PERUBAHAN HUKUM DITINJAI DARI ASPEK PENDIDIKAN

HADIS AHAD SEBAGAI DASAR PENETAPAN AQIDAH

ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI DALAM ISLAM
(Analisis Perspektif Sejarah)

المجلة العلمية إحياء العربية	Vol. IV	No. 2	Hal. 141-252	Medan Juli - Des. 2014	ISSN 2087 - 8257
---------------------------------	------------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SUMATERA UTARA
BEKERJASAMA DENGAN
ITTIHAD AL-MUDARRISIN LI AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH (IMLA)
SUMATERA UTARA

إحياء العربية

المجلة التربوية وتدرس اللغة العربية

Penanggung Jawab : Usiono
Ketua Penyunting : Sahkholid Nasution
Sekretaris Penyunting : Zulheddi

PENYUNTING PELAKSANA :

Usiono - Salamuddin - Lahmuiddin Lubis
Zulfahmi Lubis - Akmal Walad – Fahrurrozi – Zulfina

MITRA BERTASI:

D. Hidayat : UIN Jakarta
Amani Lubis : UIN Jakarta
Syafaruddin : IAIN Sumatera Utara
Ramli Abdul Wahid : IAIN Sumatera Utara
Amroeni Drajat : IAIN Sumatera Utara
Hasan Asari : IAIN Sumatera Utara
Azhar Arsyad : UIN Makasar
Aminullah : USU Medan
Dihyatun Masqan : UIN Malang
Torkis Lubis : UIN Malang
Yasmadi : IAIN Padang
Akhyar Hanif : STAIN Batusangkar

TATA USAHA:

Putri Ani Dalimunthe

Diterbitkan Oleh :

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SUMATERA UTARA
BEKERJASAMA DENGAN
ITTIHAD AL-MUDARRISIN LI AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH (IMLA)
SUMATERA UTARA

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate – Medan 20731

Telp. 061- 6622925 – Fax. 061 – 6615685

e-mail: ihyaalarabiyah@yahoo.co.id dan sahkholidn@yahoo.com

محتويات

النظرية التحليلية في معنى الكلمة Zulfina	141 – 148
Semantic Perspective of English Deontic Modality Muhammad Dalimunte	149 – 159
Strategi <i>Genius Learning</i> Dalam Pembelajaran Matematika Meli Khairani Lubis & Rina Filia Sari	160 – 174
Potret Pendidikan Nilai Usiono	175 – 182
Hadis-Hadis Tentang Pendidikan Tauhid Tarmizi	183 – 199
Peranan H.Abdullah Ahmad Dalam Pembaharuan Pendidikan Sangkot Nasution	200 – 205
Pembaruan Pendidikan Islam (Telaah Retrospektif dan Prospektif) Maidar	206–215
Perubahan Hukum Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Hafsah	216–223
Hadis Ahad Sebagai Dasar Penetapan Aqidah Ahmad Zuhri	224–236
Aliran-Aliran Teologi Dalam Islam (Analisis Perspektif Sejarah) Salamuddin	237– 250
Kontributor	251– 252
Petunjuk Pengiriman Naskah	

PERUBAHAN HUKUM DITINJAI DARI ASPEK PENDIDIKAN

Hafsah

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate, 20371 - Medan
e-mail:

Abstrak: The changes will affect the mindset of society and values in the society. Openness attitudes towards acceptance of science and technology community to make progress and develop rapidly. It also helped trigger the emergence of legal issues. This simple paper intends to reveal the importance of legal education, which in turn is expected emergence of legal awareness and legal education in the importance of establishing order and peace of the state and nation.

Kata Kunci: Perubahan, Hukum, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang sudah, sedang dan akan terjadi di dunia ini. Menurut Jasin (1988: 8) ada dua dorongan manusia ingin menambah pengetahuannya terhadap sesuatu hal yang pertama; dorongan yang bersifat praktis, yakni manusia sebagai makhluk yang dapat berfikir, berbudi, berperasaan dan selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan kepercayaannya lebih tinggi, dorongan inilah membuahkan ilmu pengetahuan terapan dan teknologi. Kedua; dorongan yang bersifat nonpraktis atau teoritis, yakni manusia memiliki sifat ingin tahu dan ingin mengerti dengan sesungguhnya tentang sesuatu, dorongan ini menimbulkan pengetahuan yang disebut ilmu murni atau ilmu pengetahuan.

Manusia dengan bermodalkan bahasa, ia mampu berkomunikasi dengan manusia lainnya dalam rangka mencari informasi tentang segala sesuatu yang diinginkan untuk dipelajarinya. Di samping itu, manusia mempunyai kemampuan berfikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu yang disebut dengan penalaran. Sehubungan dengan hal itu Supyarma (2003: 37) mengatakan bahwa melalui pendidikan manusia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang andal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melalui pendidikan dan latihan yang sistematis maupun secara informal di tempat kerja, dapat juga dilaksanakan dengan pengembangan diri sendiri atas inisiatif sendiri berupaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha manusia agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang diakui oleh

masyarakat. Pengembangan potensi pada manusia bertujuan agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Manan (2006: 140), hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian baik disadari maupun tidak, proses pendidikan hukum telah dijalani karena suka atau tidak suka setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada, yang meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Disamping itu, proses pendidikan hukum sangat diperlukan agar masyarakat mengerti tentang hukum yang berlaku dan dengan telah dimengertinya suatu hukum maka timbul kesadaran untuk mematuhi dan menaatinya. Jadi, proses pendidikan hukum itu sangat diperlukan guna menumbuhkan adanya suatu kesadaran hukum seperti memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta mengetahui dengan sebenarnya tentang peraturan yang berlaku di negaranya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, bahwa pendidikan hukum sangat diperlukan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis mengangkat topik inidi atas.

B. Peranan Perguruan Tinggi Hukum

Pendidikan tinggi hukum merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dalam usaha membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan berkualitas guna menciptakan masyarakat hukum yang berkeadilan berkeadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha esa. Oleh karena itu, menurut Manan (2006: 142), Perguruan tinggi hukum sangat diharapkan untuk dapat melahirkan para sarjana hukum yang berkualitas dengan kematangan budaya, rohani, jiwa dan hati nurani yang bersumber pada etika religius. Sehubungan hal itu, perguruan tinggi hukum yang secara konsisten berupaya menghasilkan produk yang memiliki bergai kompetensi, di antaranya kompetensi akademik yang berkaitan dengan metodologi keilmuan, kompetensi profesional yang menyangkut dengan kemampuan penerapan ilmu dan teknologi dalam realitas kehidupan dan kompetensi intelektual yang berkaitan dengan kepekaan terhadap segala masalah yang berkembang dewasa ini.

Dalam era globalisasi saat ini, perguruan tinggi hukum harus mampu dan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu mempersiapkan mekanisme untuk mencetak sarjana hukum yang berkompeten dibidangnya. Perguruan tinggi harus mampu mengkombinasikan atau menghubungkan teori hukum dan praktek hukum dengan mengusahakan agar tim pengajar mampu melaksanakan kedua kegiatan ini. Dari usaha ini diharapkan Perguruan Tinggi hukum mampu menghasilkan sarjana hukum yang baik. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk misalnya penelitian dan penulisan untuk publikasi, membuka mata kuliah baru

yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini, memonitor perkembangan hukum yang digelutinya, berpartisipasi dalam kegiatan yang profesional, konsultasi untuk kantor konsultan hukum dan sebagainya.

Menurut Soekanto (1988: 169), kurikulum yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 30/DJ/KEP/1983, sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini, maka salah satu akibatnya adalah Fakultas Hukum kurang peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang ada disekitarnya. Di samping itu, kelemahan lain yang tampak dalam praktek adalah bahwa penegakan hukum masih berorientasi pada dogmatik hukum semata-mata. Sudah tiba saatnya perguruan tinggi menrapkan pola studi pendekatan interdisipliner terhadap hukum. Pola tersebut seharusnya didasarkan pada pendekatan ilmu-ilmu dasar hukum yang mencakup antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan ilmu tata negara. Selanjutnya dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, maka perguruan tinggi hukum perlu mengembangkan mata kuliah yang cakupannya Internasional, studi perbandingan dengan hukum internasional sebagai mata kuliah pilihan. Dengan demikian diharapkan mahasiswa hukum akan mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan eksternal dan bagaimana kedudukan dan peranan negaranya dalam kancah dunia internasional. Perluasan pengajaran hukum internasional yang bersifat publik dan privat serta perbandingan hukum sangat penting diajarkan di perguruan tinggi hukum, karena ilmu tersebut dapat melahirkan berbagai ide dan alternatif, memecahkan berbagai masalah hukum yang sedang terjadi.

Memasuki abad ke 21, profesi hukum mengalami perubahan besar sebagai bagian dari revolusi teknologi. Menurut Mari Tzannes sebagaimana yang dikutip oleh Rajagukguk (2001: 16), perubahan tersebut dapat terjadi dalam bidang :

1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan teknologi sudah tidak bisa dihindarkan lagi, bila perguruan tinggi hukum ingin meningkatkan kualitas mutu pendidikan hukum maka penggunaan internet dan CD mutlak diperlukan.
2. Pengintegrasian database ke dalam pendidikan hukum dapat memperluas perkuliahan ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau, sistem ini akan dapat menekan biaya untuk mendatangkan dosen, sementara bersama-sama memanfaatkan keahlian seseorang lebih mungkin dilaksanakan.
3. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempengaruhi seluruh kurikulum karena begitu banyak materi baru yang bisa diakses oleh para mahasiswa, akibatnya materi yang lama menjadi basi.
4. Teknologi informasi dan komunikasi tidak akan menggeser kebutuhan akan buku, terutama buku teks.
5. Berhasilnya pendidikan hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi tergantung juga kepada tersedianya materi kuliah yang komprehensif.

Apabila kelima point tersebut dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi hukum dengan baik, maka diharapkan mutu lulusan yang dihasilkan akan lebih meningkat. Melalui teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong ber-

kembangnya hukum yang demokratis, teknologi ini memungkinkan penciptaan web side untuk mengakses peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dan komentar terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dari Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh parlemen, diharapkan masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap putusan-putusan pengadilan melalui internet. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong terbentuknya hukum yang demokratis di negara kita.

Dalam menghadapi arus globalisasi teknologi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa aspek pendidikan hukum sangat berpengaruh dalam perubahan hukum. Pada masa sekarang dan yang akan datang pendidikan hukum ini sangat diperlukan karena sangat berkaitan dengan pembinaan hukum nasional yang sedang berusaha untuk menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat, antara lain dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam suatu tata hukum nasional yang bersifat modern dan tidak menutup diri terhadap perubahan pada masa yang akan datang. Pembangunan adalah suatu perubahan yang teratur dimana masyarakat ikut bergerak secara dinamis sehingga memerlukan hukum sebagai sarana perubahan.

C. Profesionalisme Aparat Hukum

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang profesionalisme aparat hukum, ada baiknya dibahas tentang profesionalisme itu sendiri, menurut Suseno (1991: 21) yang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme, menurut ketua Mahkamah Agung RI adalah suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan (Pidato Ketua Mahkamah Agung RI, tahun 1996). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Untuk apa digolongkan profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, maka harus mempunyai kriteria umum dan persyaratan yang harus ada pada diri seseorang, antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.

4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya. (Lubis, t.th.: 10-11).

Seorang sarjana hukum haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum saja tetapi juga harus mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum tersebut dalam arus globalisasi seperti sekarang ini. Para sarjana hukum harus mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum dan mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisipasi berbagai probelum hukum yang terjadi saat ini. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh sarjana hukum, sebab tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini yang tidak mempunyai kaitannya dengan ilmu hukum.

Profesionalisme sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ahli hukum, sebab sekarang ilmu pengetahuan sudah banyak yang saling berhubungan satu sama lain suatu pekerjaan yang profesionalisme memuat hal-hal yang ideal dan sesuatu hal yang dicita-citakan, hal ini memberikan gambaran bahwa kehidupan dan pekerjaan seseorang yang memiliki profesi adalah mengejar cita-cita atau sesuatu yang dinilai tinggi dan bermanfaat untuk umat manusia. Jika suatu pekerjaan yang memiliki nilai profesi berhasil dikerjakan oleh seseorang dengan baik, maka hal itu merupakan kunci baginya di dalam meraih sukses selanjutnya.

Keberhasilan seorang yang bergerak dalam bidang profesi hukum terlihat dari profesionalnya, baik ia sebagai hakim, Jaksa, Advokat dan sebagainya, agar ia profesional dalam melaksanakan tugasnya, dalam skop mikro ia harus terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik profesinya. Sedangkan dalam skop makro seorang profesi hukum harus dapat menjawab tantangan zaman dalam era globalisasi saat ini, ia harus menekuni berbagai ilmu pengetahuan dan tidak berhenti untuk terus belajar berbagai bidang ilmu hukum yang dapat mendukung tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan etika profesi hukum, para profesional hukum diharapkan mempunyai kemampuan individu yang kritis, ia harus mempunyai keberanian dalam menegakkan hukum dan keadilan, ia harus mampu menaggung segala kesulitan dan tabah dalam menghadapi segala cobaan sebagai dari akibat dan resiko pekerjaannya. (Manan, 2006: 153)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tenaga profesional ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan dengan sikap mental yang terpuji dan dengan keahlian dan keterampilannya itu, ia dapat menjawab persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Memasuki era globalisasi saat ini, bagi tenaga profesi hukum merupakan saat yang sulit dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang berat dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu untuk menghadapinya mau tidak mau, suka tidak suka seorang profesi hukum harus mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual sehingga ia dapat

membentuk dirinya sebagai manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan dan berkualitas sebagai sumber daya manusia yang prima baik dalam segi kecerdasan maupun dalam sikap mental yang mempunyai motivasi kuat dan jelas guna memecahkan berbagai masalah hukum yang timbul saat ini dan pada masa yang akan datang.

Dengan sistem pendidikan hukum yang baik maka akan menghasilkan tenaga profesi hukum yang andal dan sudah barang tentu akan berdampak pada pengembangan hukum dan perubahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika profesi hukum dipegang dan dikuasai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula, masyarakat akan menerima hukum yang baru itu dengan segala senang hati, jika profesi hukum di pegang dan di kuasai oleh orang-orang yang profesional.

D. Integritas Moral Yang Solid

Meskipun seorang profesi hukum memiliki keahlian, keterampilan dan cerdas serta memiliki intelektual yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi jika hal tersebut tidak didukung integritas moral yang solid, maka kesemuanya yang dimiliki itu kurang atau tidak akan mempunyai arti sama sekali. Oleh karena itu, intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesi hukum itu hendaknya harus didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal tersebut merupakan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang profesi hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Nuh (1995: 40), Umar bin Abdul Aziz ketika masih menjadi khalifah pernah memperingatkan para aparat penegak hukum (terutama para Hakim) yang bertugas di wilayah kesultannya agar selalu mencapai kesempurnaan pribadi dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas secara baik dengan berpedoman kepada antara lain :

1. Harus banyak mengetahui tentang segala hal yang berhubungan dengan ilmu hukum dan yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh.
2. Harus bersih dari nafsu tamak dan serakah serta tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam memutus perkara.
3. Harus bersikap belas kasihan dan tidak boleh mempunyai rasa dendam terhadap para pencari keadilan.
4. Harus mencontoh perilaku dan mengikuti jejak para imam serta para pendahulunya apabila masih sesuai dengan kondisi zaman.
5. Harus dapat bergaul dengan para ilmunan dan para pakar hukum serta cerdik pandai lainnya, kalau perlu mengikutsertakan pendapat mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Kualitas aparat hukum harus dikembangkan melalui kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesionalnya maupun kesejahteraannya serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin

dalam sikap yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bersih dan berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.

Dari generasi yang sadar, terdidik dan mempunyai integritas moral yang solid diharapkan munculnya gagasan segar dalam mengembangkan hukum, sebagai langkah untuk membangun mentalitas bangsa. Dalam kaitan ini Siswomiharjo (2000: 154) mengemukakan bahwa melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan generasi yang sadar dan terdidik dan mempunyai integritas moral dapat dilahirkan pendidikan yang mengarah kepada dua aspek yaitu :

1. Pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan kepada nilai-nilai atau kaedah-kaedah ilmu. Untuk itu diperlukan usaha menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman bangsa lain yang sudah lebih maju dari pada bangsa Indonesia.
2. Pendidikan untuk membentuk watak atau jati diri menjadi sarjana atau ilmun yang selalu komit kepada kepentingan bangsa. Sebab untuk membentuk jati diri bangsa tidak mungkin mengambil oper dari nilai-nilai bangsa lai, melainkan dengan menggali dari nilai-nilai budaya bangsa sendiri.

Dengan kemampuan yang dimiliki aparat hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan aparat hukum tersebut mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Di samping itu dengan kemampuan yang dimiliki itu ia mampu menjaga kebebasan dan kemandirian terhadap pengaruh dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya.

E. Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan yaitu :

1. Bahwa aspek pendidikan hukum sangat berpengaruh dalam perubahan hukum. Pada masa sekarang dan masa yang akan datang pendidikan hukum ini sangat diperlukan karena sangat berkaitan dengan pembinaan hukum nasional yang sedang berusaha untuk menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat, antara lain dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam suatu tata hukum nasional yang bersifat modern dan tidak menutup diri terhadap perubahan.
2. Dengan sistem pendidikan yang baik maka akan akan menghasilkan tenaga profesi hukum yang andal dan sudah barang tentu akan berdampak pada pengembangan hukum dan perubahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika profesi hukum dipegang dan dikuasai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan hukum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula, masyarakat akan mudah menerima hukum yang baru, jika profesi hukum dipegang dan dikuasai oleh orang yang profesional.
3. Dengan integritas moral yang solid dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat hukum, diharapkan aparat hukum tersebut mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Di samping itu dengan kemampuan yang

dimiliki itu ia mampu menjaga kebebasan dan kemandirian terhadap pengaruh dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jasin, Maskoeri, (1988), *Ilmu Alamiah Dasar*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Lubis, Suhrawardi K., (t.th.) *Etika Profesi Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, (2006), *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nuh, Zaini Ahmad, (1995), *Hakim Agama dari Masa ke Masa dalam buku kenangan IKAHA*, Jakarta: Panitia MUNAS IKAHA LB.
- Rajagukguk, Erman, (2001), *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi, Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, Medan: Pidato Dies Natalis USU.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, (2000), *Supremasi Hukum dalam Negara-negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru* (Kajian Filosofis), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, (1988), *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Supyarma, (2003), *Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Suseno, F. Magnis, (1991), *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafah Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-3.

